

LAPORAN

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA DAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

2025

PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI

Kantor Pusat: Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan (0324) 326696
Kantor Cabang: Jl. Trunojoyo No. 56 Pejagan, Bangkalan (031 3095382)
bprs.spm.official
banksyariahspm.co.id

Pamekasan, 20 Januari 2026

Nomor : 0024 /S.PGT/BPRS.SPM/I/2026
Lampiran : 15 Lembar
Perihal : Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri
(Self Assessment) PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Tahun 2025

Kepada Yth :
Asosiasi BPR Syariah
Di Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb


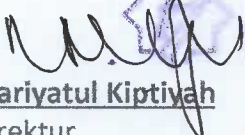
Salam silaturahmi kami haturkan kepada Saudara. Semoga rahmat dan hidayah Allah SWT senantiasa bersama kita sekalian. Aamiin.

Dengan ini kami sampaikan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (Self Assessment) PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Tahun 2025.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PT. BPR SYARIAH
SARANA PRIMA MANDIRI



Mariyatul Kiptiyah
Direktur

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BPRS Sarana Prima Mandiri memiliki komitmen untuk menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha dimasa-masa mendatang khususnya di sektor industri perbankan, komitmen ini di dukung penuh oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri.

Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, dalam mengelola bank dan konsisten serta berkelanjutan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan pemegang saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Permbiayaan Rakyat Syariah, BPRS Sarana Prima Mandiri telah melakukan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 dengan nilai komposit 3 atau berada di peringkat 3 (Cukup Baik).

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Prinsip-prinsip tata Kelola sebagaimana pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Permbiayaan Rakyat Syariah, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam menggunakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggung jawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPRS yang sehat.
4. Independensi (independence) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPRS.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan Penerapan Tata Kelola

1. Meningkatkan Kinerja BPRS: Penerapan tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas BPRS dalam menjalankan kegiatan

- usahanya, seperti memberikan pembiayaan, mengelola dana, dan melayani nasabah.
2. Melindungi Pemangku Kepentingan: Tata kelola yang baik memastikan bahwa kepentingan pemangku kepentingan (nasabah, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat sekitar) dilindungi dan diakomodir dalam setiap keputusan dan tindakan BPRS.
 3. Meningkatkan Kepatuhan: Penerapan tata kelola mendorong BPRS untuk lebih mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah yang berlaku, sehingga risiko pelanggaran hukum dan sanksi dapat diminimalisir.
 4. Mencerminkan Nilai Etika Perbankan: Tata kelola yang baik mencerminkan nilai-nilai etika perbankan yang berlaku umum, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi, yang dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, termasuk BPRS.

Dengan demikian, tujuan utama penerapan tata kelola BPRS adalah untuk menciptakan BPRS yang sehat, berkinerja baik, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, serta mampu beroperasi secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah.

D. Referensi

1. POJK No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3. POJK No. 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
4. SEOJK No.10/SEOJK.03/2019 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
5. SEOJK No. 11/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
6. SEOJK No. 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
7. SEOJK No. 9/SEOJK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
8. POJK No 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

E. Struktur Organisasi dalam Penerapan Tata Kelola BPRS

Struktur tata kelola BPRS Sarana Prima Mandiri terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Pelaksanaan Tata Kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi acuan dalam kegiatan sehari-hari BPRS Sarana Prima Mandiri.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja di BPRS Sarana Prima Mandiri telah dibuat sebagai bentuk adanya penerapan prinsip Check and balance serta sistem pengendalian internal yang baik.

F. Struktur Tata Kelola BPRS Sarana Prima Mandiri

- Struktur tata kelola BPRS Sarana Prima Mandiri terdiri dari:
 1. Rapat Umum Pemegang saham (RUPS)
 2. Dewan Komisaris
 3. Direksi
 4. Dewan Pengawas Syariah
 5. Pejabat Eksekutif satu tingkat dibawah Direksi, seperti:
 - a. PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang merangkap APU PPT PPPSPM dan Anti Fraud serta Integritas Pelaporan Keuangan
 - b. PE Satuan Pengendali Internal
 - c. Kabag Lending
 - d. Kabag Funding
 - e. Kabag Remedial
 - f. Kabag Operasional
 - g. Pimpinan Cabang
- Pengangkatan Bapak Drs. Alwi M.Hum sebagai Komisaris telah disetujui oleh OJK per tanggal 08 Agustus 2025, Sehingga kekosongan posisi Komisaris telah terisi dan saat ini jumlah Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan OJK.
- Perubahan nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Timur No KEP-35/KO.14/2025 tanggal 07 Maret 2025.
- Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Aspek Penerapan Tata Kelola

Bank telah menyelesaikan rencana tindak untuk memenuhi prinsip tata Kelola yang baik berdasarkan ketentuan yaitu:

Aspek Tata Kelola	Tindak Lanjut
Penunjukan Direksi membawahi fungsi kepatuhan	Dalam proses pengajuan fit dan proper test kepada OJK yang akan dirangkap oleh Direktur Operasional.
Penunjukan Komisaris	Telah disetujui OJK per tanggal 08 Agustus 2025 sebagai Komisaris
Pejabat Eksekutif Pimpinan Cabang Bangkalan	Dalam proses laporan kepada OJK melalui surat per tanggal 03 Juli 2024.
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	Telah direvisi dan disahkan pada tahun 2025
Kebijakan internal tentang Pengendalian Internal Integritas Laporan Keuangan	Telah selesai disusun dan disahkan pada tahun 2025
Kebijakan internal tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)	Telah selesai disusun dan disahkan pada tahun 2025
Kebijakan internal tentang Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF)	Telah selesai disusun dan disahkan pada tahun 2025
Kebijakan internal Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	Telah selesai disusun dan disahkan pada tahun 2025
Kebijakan internal Unit yang Menjalankan Literasi dan Inklusi Keuangan	Telah selesai disusun dan disahkan pada tahun 2025
Kebijakan internal Layanan Pengaduan Konsumen	Telah selesai disusun dan disahkan pada tahun 2025
Kebijakan internal Pelaksanaan Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) dan Simpanan Pelajar (Simpel)	Telah selesai disusun dan disahkan pada tahun 2025

B. Hubungan Afiliasi

hubungan afiliasi adalah hubungan keluarga dan hubungan keuangan antara sesama direksi, komisaris, pengawas Syariah, dengan anggota dewan komisaris dan antara anggota direksi dengan pemegang saham.

Nama	Jabatan	Hubungan Afiliasi			
		Dekom	DPS	Direksi	Pemegang Saham
Achmad Sanusi	Komisaris Utama	X	X	X	V
Drs. Alwi M.Hum	Komisaris	X	X	X	V

KH. Lailur Rahman, Lc	Ketua Dewan Pengawas Syariah	X	X	X	X
Prof. Dr. Moh. Zahid M.Ag	Dewan Pengawas Syariah	X	X	X	X
Ali Askar	Direktur Utama	X	X	X	X
Mariyatul Kiptiyah	Direktur	X	X	X	X

C. Kepemilikan Saham Direksi, Komisaris & Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan aspek transparansi dan keterbukaan, kepemilikan saham Direksi, Komisaris dan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri per 31 Desember 2025 diungkapkan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Rp. Kepemilikan	% Kepemilikan
Achmad Sanusi	Komisaris Utama	38.491	Rp. 38.491.000.000,-	94,29%
Drs. Alwi M.Hum	Komisaris	1.590	Rp. 1.590.000.000,-	1.81%
KH. Lailur Rahman, Lc	Ketua DPS	-	-	-
Prof. Dr. Moh. Zahid M.Ag	DPS	-	-	-
Ali Askar	Direktur Utama	-	-	-
Mariyatul Kiptiyah	Direktur	-	-	-

D. Remunerasi dan Fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah remunerasi dan fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diterima selama satu tahun pada 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
Remunerasi:						
Gaji	2	228.000.000	2	144.000.000	2	57.000.000
Tunjangan	2	30.072.000	2	-	2	-
Tantiem	2	-	2	-	2	-
Bonus	2	-	2	-	2	-
Kompensasi Berbasis Saham	2	-	2	-	2	-
Remunerasi Lainnya	2	-	2	-	2	-
Total Remunerasi		258.072.000		144.000.000		57.000.000

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
Fasilitas Lain:						
Perumahan	2	30.000.000	2	-	2	55.200.000
Transportasi	2	-	2	-	2	-
Kesehatan	2	11.928.000	2	-	2	-
Fasilitas Lainnya	2	-	2	-	2	-
Total Fasilitas Lain		41.928.000		0		55.200.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		300.000.000		144.000.000		112.000.000

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji	Perbandingan
Rasio gaji Direksi Tertinggi : Terendah	0.79
Rasio gaji Komisaris Tertinggi : Terendah	1.18
Rasio gaji DPS Tertinggi : Terendah	1.16
Rasio gaji Karyawan Tertinggi : Terendah	0.43
Rasio gaji Direksi Tertinggi : gaji Komisaris Tertinggi	0.46
Rasio gaji Direksi Tertinggi : gaji Karyawan Tertinggi	0.38

F. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

▪ Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2025 telah dilakukan delapan kali (8x) rapat Dewan Komisaris. Posisi komisaris saat ini telah terisi dan jumlah Dewan Komisaris berjumlah 2 orang. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tgl Rapat	Agenda Rapat	Online/Offline	Kehadiran Dewan Komisaris
05-02-2025	Pembahasan Nasabah BMPD dan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025	Offline	Lengkap
17-04-2025	Arahan dari Komisaris Utama mengenai Bank kedepannya	Offline	Lengkap
06-05-2025	RUPS tahun buku 2024	Offline	Lengkap
31-07-2025	RUPS Pengangkatan Komisaris sekaligus Pengangkatan kembali Direktur dan Pembahasan Action Plan Bisnis Bank	Offline	Lengkap
02-08-2025	Arahan dari Komisaris (Bapak Drs Alwi M.Hum) mengenai kondisi Bank.	Offline	Lengkap
22-08-2025	Pembahasan Kepatuhan Pelaksanaan	Offline	Lengkap

	POJK terkait dengan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat		
02-09-2025	Pembahasan Kepatuhan Pelaksanaan POJK terkait Literasi dan Inklusi Keuangan	Offline	Lengkap
28-10-2025	Pembahasan Kegiatan Operasional Bank Kedepannya	Offline	Lengkap

▪ **Rapat Direksi**

Bahwa berdasarkan pedoman dan tata tertib kerja Direksi bahwa pelaksanaan rapat Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pelaksanaan rapat Direksi selama tahun 2025 diselenggarakan sebanyak 12 kali.

Tgl Rapat	Agenda Rapat	Online/Offline	Kehadiran Dewan Komisaris
03-01-2025	Rekapan laporan sesuai dengan jadwal pelaporan	Offline	Lengkap
24-02-2025	Pembahasan Pengawasan Aktif Direksi atas Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM	Offline	Lengkap
12-03-2025	Strategi Penagihan NPF dan Write Off	Offline	Lengkap
10-04-2025	Juknis bagian Pelaporan Bulanan dan Bagian IT	Offline	Lengkap
20-05-2025	Pembahasan Likuiditas Bank menjelang Tahun Ajaran Baru Sekolah	Offline	Lengkap
25-06-2025	Perpanjangan Sewa Aset Inbreg berupa Gedung yang disewa BSI	Offline	Lengkap
15-07-2025	Perpanjangan Sewa Kantor Inbreg	Offline	Lengkap
06-08-2025	Pembiayaan PKE Khusus Payroll Karyawan PSP	Offline	Lengkap
03-09-2025	Pencapaian Target RBB 2025	Offline	Lengkap
28-10-2025	Arahan dari Dewan Komisaris mengenai Kegiatan Operasional Bank	Offline	Lengkap
17-11-2025	Pembahasan risalah prudential meeting tgl 05 Nov 2025	Offline	Lengkap
03-12-2025	Pembahasan kebutuhan tenaga kerja	Offline	Lengkap

▪ **Rapat Dewan Pengawas Syariah**

Berdasarkan pedoman tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah bahwa pelaksanaan rapat DPS diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pemeriksaan di kantor BPRS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selain melakukan uji petik, sepanjang tahun 2025 telah dilakukan 11 kali rapat Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan opini Dewan Pengawas Syariah atas permasalahan yang diajukan oleh Direksi.

Tgl Rapat	Agenda Rapat	Online/Offline	Kehadiran Dewan Komisaris
21-01-2025	Pengawasan DPS terkait kegiatan BPRS SPM di Bulan Des 2024 Pembahasan terkait perkembangan penurunan deposito dengan skema special rate	Offline	Lengkap
12-02-2025	Pengawasan DPS terkait kegiatan BPRS SPM di Bulan Januari 2025 Pembahasan pembiayaan murabahah bahwa barang yang diperjual belikan harus jelas dan dimiliki bank terlebih dahulu.	Offline	Lengkap
05-03-2025	Pengawasan DPS terkait Kegiatan BPRS SPM di bulan Feb 2025 Pembahasan rekening titipan haji dan penyebutan jenis barang untuk murabahah lebih baik bukan barang dagangan namun barang toko kelontong.	Offline	Lengkap
24-04-2025	Pengawasan DPS terkait Kegiatan BPRS SPM di bulan Mar 2025 Pembahasan sasaran pembiayaan PKE dan saran DPS pada tabungan mudharabah untuk menyebutkan nisbah.	Offline	Lengkap
20-05-2025	Pengawasan DPS terkait Kegiatan BPRS SPM di bulan Apr 2025 Pembahasan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan terutama dalam jumlah besar.	Offline	Lengkap
30-06-2025	Pengawasan DPS terkait Kegiatan BPRS SPM di bulan Mei 2025 Pembahasan pada akad murabahah terkait tujuan pembiayaan diwajibkan menyebutkan barang yang akan dibeli.	Offline	Lengkap
15-07-2025	Pengawasan DPS terkait Kegiatan BPRS SPM di bulan Juni 2025 Pembahasan pada akad pembiayaan murabahah untuk tujuan pembiayaan menyebutkan jenis barang dan tidak ada lagi kata pembelian atau tambahan pembelian.	Offline	Lengkap
25-08-2025	Pengawasan DPS terkait Kegiatan	Offline	Lengkap

	BPRS SPM di bulan Juli 2025 Pembahasan pembiayaan mudharabah jika diikuti dengan perpanjangan jangka waktu dengan mengurangi modal maka harus dilunasi terlebih dahulu.		
21-10-2025	Pengawasan DPS terkait Kegiatan BPRS SPM di bulan Sept 2025 Pembahasan akad Murabahah PKE	Offline	Lengkap
14-11-2025	Pengawasan DPS terkait Kegiatan BPRS SPM di bulan Okt 2025 Pembahasan pembiayaan Ijarah Multijasa bahwa untuk upah atau sewa disampaikan berupa nominal bukan prosentase	Offline	Lengkap
17-12-2025	Pengawasan DPS terkait Kegiatan BPRS SPM di bulan Nov 2025 Pembahasan terkait perbedaan tabungan Simpel dengan produk tabungan lainnya.	Offline	Lengkap

G. Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap adalah selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyimpangan Intern (1 tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

H. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPRS selama periode 2025 dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian adalah:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-

I. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang memiliki benturan kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

J. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/atau Politik

No	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20-01-2025	Sosial	Sumbangan Dana	Branjangan Play On Fun Run	Rp. 200.000,-
2	30-01-2025	Sosial	Sumbangan Dana	Musholla Darussalam	Rp. 200.000,-
3	31-01-2025	Sosial	Sumbangan Dana	Universitas Trunojoyo	Rp. 100.000,-
4	13-03-2025	Sosial	Pembagian 100 Takjil kepada Tukang Becak	BPRS SPM	Rp. 1.000.000,-
5	19-03-2025	Sosial	Pembagian 100 Takjil	BPRS SPM	Rp. 500.000,-
6	24-03-2025	Sosial	Santunan Anak Yatim	Ikatama	Rp. 150.000,-
7	10-04-2025	Sosial	Sumbangan Dana	SDN Lemper 1	Rp. 250.000,-
8	16-05-2025	Sosial	Sumbangan Dana	SDN Panglegur II	Rp. 150.000,-
9	16-05-2025	Sosial	Sumbangan Dana	SDN Gladak Anyar 4	Rp. 100.000,-
10	16-05-2025	Sosial	Sumbangan Dana	Yayasan Islam Al Furqon	Rp. 100.000,-
11	19-05-2025	Sosial	Sumbangan Dana	Paud Asy Syuhada	Rp. 100.000,-
12	27-05-2025	Sosial	Sumbangan Dana	TK Muslimat NU V Murtajih	Rp. 100.000,-
13	27-05-2025	Sosial	Sumbangan Dana	SDIT Al Ghazali	Rp. 100.000,-
14	03-06-2025	Sosial	Sumbangan Dana	MI Islamiyah Sumur Putih	Rp. 100.000,-
15	30-07-2025	Sosial	Sumbangan Dana	Kelurahan Pejagan	Rp. 250.000,-

				Bangkalan	
16	22-08-2025	Sosial	Sumbangan Dana	Kelurahan Bandaran	Rp. 200.000,-
17	09-09-2025	Sosial	Sumbangan Dana	HUT TNI Ke 80	Rp. 300.000,-
18	17-09-2025	Sosial	Sumbangan Dana	SDN Larangan Badung 3	Rp. 150.000,-
19	30-09-2025	Sosial	Sumbangan Dana	PP Nurul Hidayah	Rp. 1.000.000,-
20	21-10-2025	Sosial	Sumbangan Dana	Yayasan Darul Akhlaq	Rp. 115.000,-
21	04-11-2025	Sosial	Sumbangan Dana	SMPN 2 Pademawu	Rp. 100.000,-
22	06-11-2025	Sosial	Bantuan Souvenir Jam Dinding	Dinas Pendidikan Pamekasan	Rp. 593.000,-
23	12-11-2025	Sosial	Sumbangan Dana	SDN Nyalabuh Laok II	Rp. 100.000,-
24	20-11-2025	Sosial	Sumbangan Dana	SDN Jalmak dan SDN Teja	Rp. 222.000,-
25	25-11-2025	Sosial	Bantuan Dana berupa 1 buah Tumpeng	HUT PGRI Pamekasan	Rp. 400.000,-
26	02-12-2025	Sosial	Bantuan Dana Peduli Bencana	Sumatera dan Aceh	Rp. 2.000.000,-

BAB III PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

A. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPRS

1. Nilai dan Peringkat Komposit

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Penerapan Tata Kelola BPRS Sarana Prima Mandiri adalah sebagai Berikut:

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3	3	3	-	3	3	3	3	3	4	4	3	3
Predikat Komposit	CUKUP BAIK												

2. Analisa hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*)

Penerapan tata Kelola pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri pada tahun 2025 ini tergolong **Cukup Baik** dengan nilai komposit 3. Transparansi pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban organisasi dinilai cukup baik, Pada tahun 2025 kekosongan komisaris telah terisi dan jumlah Dewan Komisaris saat ini telah sesuai dengan ketentuan OJK. Namun masih terdapat kekosongan Direktur Kepatuhan. BPRS SPM telah berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani melalui pelatihan internal dan eksetrnal serta menyelenggarakan rapat berkala antara Dekom, Direksi dan DPS. BPRS SPM telah melakukan promosi terhadap nasabah maupun calon nasabah untuk meningkatkan Simpanan melalui program baru yaitu Tabungan Berhadiah, meningkatkan outstanding pembiayaan dengan program pembiayaan baru yaitu Pembiayaan Kepemilikan Emas serta mempromosikan Tabungan Kejar dan Simpangan Pelajar (Simpel).

BAB III PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment BPRS ini pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya Insani yang ada di BPRS SPM. Sehingga BPRS SPM mengupayakan agar informasi strategis dan signifikan tidak ada yang tertinggal. Penerapan tata kelola yang baik memberikan dampak positif seperti peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, efisiensi operasional, dan daya saing BPRS, serta dapat membantu BPRS dalam mencapai tujuan strategisnya. Selain itu penerapan tata Kelola yang baik bermanfaat dalam menjaga keberlanjutan BPRS di tengah persaingan yang semakin ketat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti peningkatan kompetensi karyawan, perbaikan pada proses bisnis, peningkatan kualitas data, peningkatan core banking sistem, peningkatan sistem pengawasan internal dan penyempurnaan kebijakan. Dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan, BPRS dapat menjadi lembaga keuangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment BPRS SPM tahun 2025 ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha Manajemen serta seluruh jajaran PT BPRS Sarana Prima Mandiri dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada pemegang saham sebagai bentuk pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Profesional dan Kewajaran dari BPRS Sarana Prima Mandiri.

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SELF ASESSTMENT

Nama BPRS : PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI

Alamat : JL. KH. AGUS SALIM NO. 20

Kota/Kabupaten : PAMEKASAN

Setelah memperhatikan dan membaca Laporan Self Asesstment Bank PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Tahun 2025, maka dengan ini kami menyetujui dan sekaligus mengesahkan Laporan Self Asesstment Bank PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tersebut diatas.

Pamekasan, 21 Januari 2026

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri


Ali Askar
Direktur Utama


Mariyatul Kiptiyah, SE
Direktur


H. Achmad Sanusi
Komisaris Utama



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPRS : PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI

Alamat : JL. KH. AGUS SALIM NO. 20

Kota/Kabupaten : PAMEKASAN


Setelah memperhatikan dan membaca Laporan Penerapan Tata Kelola Bank PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Tahun 2025, maka dengan ini kami menyetujui dan sekaligus mengesahkan Laporan Penerapan Tata Kelola Bank PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tersebut diatas.

Pamekasan, 21 Januari 2026

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri


Ali Askar
Direktur Utama


Mariyatul Kiptiyah, SE
Direktur


H. Achmad Sanusi
Komisaris Utama